

Laporan Kuliah Umum

Jurusan Administrasi Publik

Tema :

“Pembangunan dan Tata Kelola Desa”

Refleksi atas Pemberdayaan Berbasis Gender dan Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pemateri :

Muhammad Syukri, Ph.D

Peneliti The SMERU Research Institut



HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan : Kuliah Umum
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jumlah Peserta : 100 Orang
Waktu Pelaksanaan : 28 April 2021
Tempat : Ruang Zoom Meeting

Padang, 01 Mei 2021

Kepala
Labor Administrasi Publik

(Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c)

MENGETAHUI

Dekan
Fisip, UNAND

Ketua
Jurusan Administrasi Publik

Drs Azwar, M.Si
Nip. 196712261993031001

Dr Ria Ariany, M.Si
Nip. 197302132008122001

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Perkembangan suatu wilayah yang disebut Desa tidak berjalan secara bersamaan. Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor dan potensi yang dimiliki sebagai karakteristik yang melekat secara khas di setiap desa. Kondisi lingkungan geografis dan penduduk suatu desa dengan desa lainnya berbeda, maka potensi desa pun berbeda. Pemahaman terhadap potensi yang tersimpan dan dimiliki oleh suatu desa seperti potensi sosial, ekonomi, demografis, agraris, politis, kultural dan sebagainya dapat menjadi instrumen penting untuk mentelaah permasalahan dan upaya pemecahannya. Hal itulah yang mendasari munculnya berbagai pendekatan konseptual yang melihat perkembangan desa secara kategoris dan kemudian mengklasifikasikannya dengan merujuk pada karakteristik yang khas melekat.

Pada umumnya, Desa digambarkan sebagai wilayah yang mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan seperti kesejahteraan, layanan publik dasar, infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia. Pandangan ini juga dinyatakan oleh Johnson bahwa Desa biasanya sarat dengan permasalahan kemiskinan, rendahnya layanan publik, peluang pekerjaan dan sarana hiburan yang diperlukan publik. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan nasional dan stakeholder terkait yang kini telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional. Berbagai permasalahan dalam lingkup perdesaan tentu harus dapat diatasi dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki oleh desa dengan penduduknya sebagai subjek dalam pembangunan, serta didukung oleh kerangka kebijakan secara nasional yang secara konsisten diterapkan. Pergeseran paradigma pembangunan nasional yang kini menekankan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didukung

dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) menjadi antitesa atas kegagalan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang sangat teknokratis. Paradigma pertumbuhan ini mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan. Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Anggapan tersebut tidak mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba – tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurangnya transparansi seorang kepala desa dalam mengelola proses pemerintahan. Kurang transparannya sebuah pemerintahan akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat salah satunya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintahan desa. Sangat penting jika prinsip tersebut dikembangkan dalam sebuah pemerintahan desa supaya dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dari aparatur desa. Menurut Kaloh (2009:174), transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas kepala desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi pada pemerintahan desa terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidakjelasan mekanisme dalam mengakses data. Hal tersebut terjadi

akibat peran dari aparat desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat. Masalah tersebut dapat menjadi indikator peran dari perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa pada umumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan diadakan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini, yaitu:

- a. Sebagai salah satu bentuk perkuliahan dengan menghadirkan pakar yang lebih paham mengenai bagaimana Pembangunan dan Tata Kelola Desa Refleksi atas Pemberdayaan Berbasis Gender dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- b. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa maupun dosen Jurusan Administrasi Publik dan ASN mengenai bagaimana Pembangunan dan Tata Kelola Desa Refleksi atas Pemberdayaan Berbasis Gender dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini telah dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 April 2021
Tempat : Ruang Zoom Meeting

D. PESERTA

Kegiatan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini diikuti oleh sebanyak 100 orang, yang terdiri dari mahasiswa, alumni dan dosen Administrasi Publik dan beberapa peserta dari luar Universitas Andalas.

E. NARASUMBER DAN MODERATOR

Narasumber : Muhammad Syukri, Ph.D
Moderator : Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c

F. KEPANITIAAN

Sekretaris : Ratih Melindo
Acara : Monika Safitri
M.N Gemilang Wicaksono
Evandes Travolta
Humas : Nurfadisa
Infokom : Mhd Havizh, AS
Fathoni Nugraha Irkha
Ahmad Rusdi

G. JADWAL KEGIATAN DAN BAHAN PAPARAN

(Terlampir)

H. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Umum Jurusan Administrasi Publik ini disusun untuk dapat diketahui oleh berbagai pihak. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik

Padang, 01 Mei 2021

Kepala Labor Administrasi Publik

Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c

Lampiran I
Jadwal Kegiatan

Susunan Acara Kuliah Umum Jurusan Administrasi Publik
Refleksi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia

No	Hari/Tanggal	Waktu	Agenda
1	25 April – 27 Apr 2021	09.46 – 23.59	Pendaftaran Peserta
2	28 April 2021	09.15 – 09.50	Registrasi Peserta
3		10.15 – 10.20	Pembukaan Oleh MC
4		10.20 – 10.25	Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Labor Administrasi Publik
5		10.25 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab
6		12.30 – 12.35	Pemberian Sertifikat
7		12.35 – 12.40	Penutup

Lampiran II
Ringkasan Bahan Paparan Narasumber



Introduction

On Participatory Governance (PG)

- “The involvement of people in the decision-making process on issues relevant to their life that involve deliberation” (Fung and Wright 2003)
- Participatory governance promises to deliver a better governance (more responsive and inclusive)
- Indonesia has had numerous PG projects since the 1970s, with the National Program for Community Empowerment (PNPM) as the latest.
- Village Law: institutionalization of participatory principle in village governance, 2014- now
- Participatory Village Governance (PVG): A set of policies under the umbrella of the Village Law



Cooperation, Wonogiri



Cooperation, Jember

Participatory Village Governance Policies

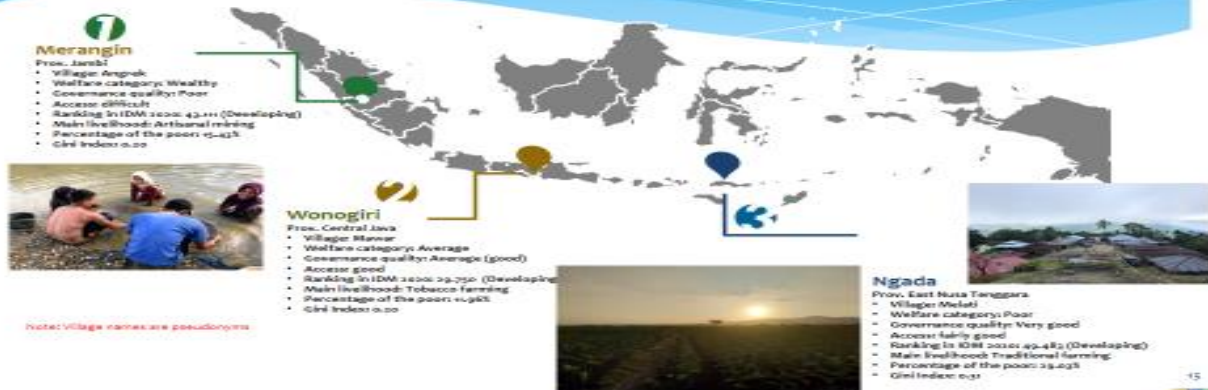
- The idea has evolved since 2004, but World Bank's PNPM outperforms it
- Aimed to strengthen the capacity and position of villages through, among others, principles of
 - “recognition” (of variety)
 - “subsidiarity” (independence but part of state bureaucracy)
- The primacy of participation and deliberation
- Huge village funds



Hamlet meeting, Wonogiri

Research Locations

Conducted in Three Villages in Three Different Districts and Provinces



Ranking in Village Developing Index (IDM)

Level	Ranking	Status	Score
Province of Jambi	10	Developing	0.6734
District Merangin	149	Developing	0.6714
Village Angrek	43.xxxx	Developing	0.62xx
Central Java	8	Developing	0.6820
Wonogiri	68	Developing	0.7034
Village Mawar	29.xxxx	Developing	0.66xx
East Nusa Tenggara	31	Left Behind	0.5804
Ngada	286	Developing	0.6218
Village Melati	49.xxxx	Developing	0.61xx

Source: <https://idm.kemendesa.go.id/>

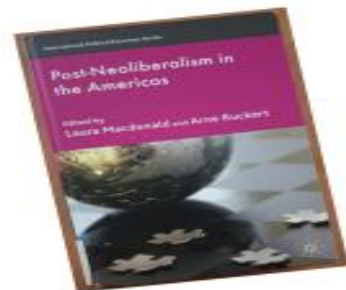
New Developmentalism (1)

Responded to new liberalism (poverty and inequality)

- * A hybrid and pragmatic approach to development (Neither retaining old developmentalism nor rejecting neoliberal market mechanisms; committing to nationalism but fairly open to the market system)

Old Developmentalism	New Developmentalism
Industrialisation is based on import substitution	Export-led growth combined with strong domestic market
Leading role for the state in obtaining forced savings and in making investments	The state is supposed to create investment opportunities and reduce economic inequalities
Industrial policy is central	Industrial policy is subsidiary
Mixed attitude in relation to budget deficits	Rejection of fiscal deficits
Relative complacency towards inflation	No complacency towards inflation

19



New Developmentalism (2)

- * New Developmental governance
 - * Increasing role of the state
 - * Avoiding sensitive issues, such as law enforcement, corruption, deepening democracy
 - * Governance through hierarchy
 - * Reliance on bureaucracy
 - * More inclined to illiberalism and authoritarianism



21

New Developmentalism (3)

- * New Developmental Social Policy
 - * Another version of neoliberal social policy
 - * Focus on:
 - * Participation
 - * Empowerment
 - * Co-responsibility

PVG and Gender Equity (1)

- * Gender equity policies in PVG
 - * The introduction of the concept 'gender justice'
 - * Gender justice as gender mainstreaming policy
- * Limited and not consistent policies toward women's empowerment
 - * Gender inequality are mentioned in regulations, but are not well addressed
- * No affirmative action policies toward women's empowerment
- * PVG tends to perpetuates traditional gender relation
 - * Project effectiveness vs. transformation

25

PVG and Gender Equity (2)

Table 1. Gender matrix of participatory village governance's regulations

Regulations	N	Presence of gender awareness (%)	Gender affirmative policies			Occurrence of words	
			Participation (access and benefit) (%)	Decision-making (control) (%)	Affirmative budget (%)	Gender *	Women**
National	45	0	17.78	2.22	0	13.33	35.56
Local	47	0	27.66	6.38	0	12.77	40.43
Total	92	0	22.83	4.35	0	13.04	38.04

*. 1.5 words per relevant regulation

** . 4 words per relevant regulation

PVG and Gender Equity (3)

Table 2. Comparison of village budget components, 2015, 2016, 2017 in villages in districts of Wonogiri, Ngada, and Merangin.

Budget	A village in Wonogiri	A village in Ngada	A village in Merangin
2015			
Total budget (Rp)	Rp 803,827,000 (US\$56,600)	Rp 579,177,912 (US\$40,800)	Rp 375,431,431 (US\$26,400)
Governance admin (%)	N/A*	34.81	42.38
Village development (%)	N/A*	40.57	40.98
Community support (%)	N/A*	1.98	12.83
Community empowerment (%)	N/A*	23.55	4.00
2016			
Total budget	Rp 1,397,377,000 (US\$98,500)	Rp 1,032,923,670 (US\$72,800)	Rp 814,477,738 (US\$57,400)
Governance admin (%)	31.39	38.98	28.14
Village development (%)	65.04	66.40	60.22
Community support (%)	4.07	4.35	2.07
Community empowerment (%)	0.38	1.45	13.56
2017			
Total budget	Rp 1,398,391,000 (US\$98,400)	Rp 1,345,388,842 (US\$94,800)	Rp 1,317,279,824 (US\$92,800)
Governance admin (%)	33.70	31.55	20.88
Village development (%)	65.52	69.87	49.20
Community support (%)	3.78	1.17	5.88
Community empowerment (%)	0.44	0.98	15.48

Sources: Calculated from each village's budget document year 2015, 2016, 2017.

*For 2015, this village developed its budget document in a very different way that is not comparable to the other villages



Some main regulations of PVG

29

PVG and Gender Equity (4)

Table 3. Participation and voice in meetings at various levels by gender from 2015-2017 in villages in districts of Wonogiri, Ngada, and Merangin.

Level of meetings	Village	Subdistrict	District
Participation			
Average number of participants per meeting	31.7	38.8	41.9
Percentage of male attendance (%)	77.4	74.5	85.0
Percentage of female attendance (%)	22.6	25.5	15.0
Voice			
Average number of speakers per meeting	3.8	4.4	7.6
Percentage male speakers (%)	85.9	90.6	79.7
Percentage female speakers (%)	14.1	9.4	20.3

Source: Calculated from the village monitoring data collected by The SMERU Research Institute

1. In the implementation of PVG, the marginal people, including women, received almost nothing from the village budget

Table 3. Village budget in three villages in Ngada, Wonogiri, and Merangin respectively, years 2015-2017

Villages	2017 Poverty rate (%)	2015		2016		2017	
		Activities	Budget (USD\$)	Activities	Budget (USD\$)	Activities	Budget (USD\$)
Mawar	33	-	-	House rehabilitation for the poor	3207	House rehabilitation for the poor	783
Melati	29	Toilets for the poor	1032	Toilets for the poor	926	Toilets for the poor	470
Anggrek	14	Assistance for orphans	213	-	-	-	-

Sources: Calculated by author from budget documents of the three villages

Journal of Sustainable Development, Vol. 11, No. 1, 2019, pp. 28-32

ISSN 1549-3809 print; ISSN 2158-3216 online

www.iiste.org

Copyright © 2019, IISTE, All rights reserved.

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

www.iiste.org

Village Funds and their Usage



* Data from Ministry of Villages, based on 91.83% of village reports

37

3. Village decision making is still dominated by male village elites

Table 5. Participation and voices in various meetings 2015-2018

	Village level	Kecamatan	Kabupaten
Participation			
Average participant per meeting	31.7	38.8	41.9
Percentage of male attendance (%)	77.4	74.5	85.0
Percentage of female attendance (%)	22.6	25.5	15.0
Raising concern			
Average voice per meeting	3.8	4.4	7.6
Percentage of male voice (%)	85.9	90.6	79.7
Percentage of female voice (%)	14.1	9.4	20.3
Marginal group representation			
Meeting with marginal group (%)	19.5	0	0
Meeting without marginal group (%)	80.5	100	100

Source: Calculated by author from SMERU's Sentinel Village data



39

While the law potentially accords villages (quasi-)independent status, the new developmental regime of Joko Widodo (Jokowi) has deflected it by introducing a very bureaucratic and hierarchical interpretation of the law: The village is transformed into a bureaucratic machine

4. PVG as an instrument to achieve the “national interest”

- * Recognition vs Subsidiarity principles
- * Strong position of village executive vs weak Village Deliberative Body (BPD)
- * Centralized development planning
- * Domination of Supra-Village government



5. Villages under the strict “Good Governance” regime

Table 6. Various instruments to promote good governance

Categories	Instruments	Issuers
Surveillance instruments	Village Financial System	State Internal Audit and Ministry of Home Affairs
	Village Development Information System	Ministry of Villages
	Geographical Information System for Village Potential	Ministry of Villages
	Online Monitoring System for State Treasury and Budget	Ministry of Finance
	Urban Ward and Rural Village Profile Information System	Ministry of Home Affairs
Coercive Institutions	Village Development Index	Ministry of Villages
	Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan/TP4 (Team for Overseeing and Securing Governance and Development)	National Attorney
	Police Bintara Pembina Desa/Babinsa (Non-Commissioned Officer for Guiding the Village)	National Police Indonesian Armed Forces
Compliance Engineers	Facilitators	Ministry of Villages

Military-Society united for Village Development



Source: <https://beritalama.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG-20180711-WA0074.JPG>

45

Conclusion

PVG policies focus narrowly on village infrastructure development and economic growth

- * To achieve the goals, Jokowi regime introduces a very hierarchical mode of governance in the villages
- * Such a mode of governance has violated village independence and jeopardized village democracy and transformed the village into a bureaucratic machine
 - * It does as it is ordered—no policy initiative in villages to tackle poverty and marginality
- * The inclination to implement a very hierarchical mode of governance at the village level represents a tendency of the Jokowi regime at the national level toward illiberalism and authoritarianism
- * Gender equity is not a focus of the policy.
- * Rather than transforming the traditional gender relation, PVG tends to perpetuate it.